

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA TAMBAK
UDANG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN PEUKAN BADA GAMPONG LAM LUMPU LHOK**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**MUHAMMADZULHAM
NIM 190802089**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zulham
NIM : 190802089
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar 4 April 2001
Alamat : Desa Baroh Geunteut Kec.Lhoong Kab.Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkannya dan mempertanggungjawabkannya.
2. Tidak menggunakan tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran sendiri.
3. Tidak menggunting-tempel tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumber asli dengan jelas
4. Tidak menyerahkan karya orang lain sebagai karya ilmiah saya.
5. Apabila terbukti melakukan pelanggaran hal-hal tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang sah bahwa memang ditemukan adanya plagiarisme atau penjiplakan dalam karya saya, saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan akademik yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.


MUHAMMAD ZULHAM
NIM.190802089

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA
TAMBAK UDANG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN PEUKAN BADA GAMPONG LAM
LUMPU LHOK

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

MUHAMMAD ZULHAM

NIM.190802089

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Banda Aceh, April
2026 Disetujui untuk
diseminarkan oleh:

Penasehat Akademik,



Zakki Fuad Khalil, M.Si

NIP.199011192022031001

Ketua Program Studi,



Muazzinah, B.Sc., M.PA

NIP.198411252019032012

PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Muhammad Zulham

NIM.190802089

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu/17 Juni

Banda Aceh,
Panitian Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



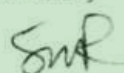
Zakki Fuad Khalil, M.Si.
NIP. 199011192022031001

Penguji I,



Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Sekretaris,



Shafiyur Rahman, S.A.P.
NIP. -

Penguji II,



Cut Zamharira, S.IP., M.A.P.
NIP. 197911172023212012

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTARK

Usaha tambak udang merupakan salah satu sektor ekonomi yang berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Keberhasilan pengembangannya tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam memberikan kebijakan, pembinaan, pendampingan, serta dukungan terhadap sarana produksi dan pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan usaha tambak udang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Lam Lumpu Lhok, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang belum berjalan secara optimal. Pemerintah telah memberikan bantuan sarana dan prasarana, benur, pendampingan teknis, penyuluhan, serta dukungan terhadap akses permodalan dan pemasaran, namun pelaksanaannya belum berkelanjutan dan belum menjangkau seluruh pembudidaya. Faktor pendukung meliputi potensi sumber daya alam, tingginya minat masyarakat, keberadaan penyuluh perikanan, dan dukungan pemerintah, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, modal usaha, pendampingan, fluktuasi harga udang, serta serangan penyakit. Kesimpulannya, pengembangan usaha tambak udang telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat, namun diperlukan penguatan peran pemerintah daerah agar pelaksanaan program lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah Daerah, Pengembangan Usaha Tambak Udang, Kesejahteraan Masyarakat.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan proposal berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Tambak Udang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Peukan Bada Gampong Lam Lumbu Lhok”**. Selanjutnya shalawat beserta salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para alim ulama.

Adapun tujuan dari penyusunan proposal skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat proses penulisan skripsi, dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan proposal ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. MujiMulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UINAr-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara.
5. Dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Serta yang istimewa, terima kasih setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, serta selalu menyertakan penulis dengan do'a dan kepada Seluruh keluarga yang

telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Hanya kepada Allah SWT penulis serahkan, semoga semua kebaikan mereka mendapat balasan pahala terbaik darinya. Selanjutnya, penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, segala kritikan dan saran yang berguna untuk proses penyempurnaan proposal ini sangat penulis harapkan. Demikian semoga proposal skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 17 Juni 2026

MuhammadZulham
190802109



DAFTAR ISI

LEMBARPERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
ABSTARK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 LandasanTeori.....	12
2.2.1 Teori Administrasi Publik	13
2.2.2 Teori Peran Pemerintah Daerah	14
2.2.3 Teori Sumber Daya Manusia	19
2.3 Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODEPENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Lokasi penelitian	30
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	31
3.5 Informan Penelitian.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Profil Gampong Lam Lumpu Lhok	38
4.2 Hasil Penelitian	40
4.2.1 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Tambak Udang.....	40
4.2.2 Program Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Tambak Udang.....	52
4.2.3 Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Tambak Udang	55
4.2.4 Dampak Pengembangan Usaha Tambak Udang terhadap Kesejahteraan Masyarakat	58
4.3 Pembahasan.....	60
4.3.1 Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Tambak Udang.....	60

4.3.2 Analisis Program Pemerintah dalam Pengembangan Tambak Udang	61
4.3.3 Analisis Kendala Pengembangan Tambak Udang	62
4.3.4 Analisis Dampak Pengembangan Tambak Udang terhadap Kesejahteraan Masyarakat	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTARPUSTAKA	68
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Indikator Penelitian	29
Tabel 3. 2 Profil Singkat Lokasi Penelitian	30
Tabel 3. 3 Informan Penelitian.....	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	27
--------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	71
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Dengan luas daratan sekitar 1,92 juta km², wilayah perairan nusantara sekitar 3,1 juta km², serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekitar 2,7 juta km², Indonesia memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km. Potensi ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.¹

Kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional tergolong signifikan dan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sektor ini tidak hanya berperan dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.²

Namun demikian, kondisi geografis Indonesia yang beragam menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Perbedaan potensi sumber daya, kapasitas daerah, serta kebijakan pembangunan mengakibatkan adanya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengelola

¹Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2020). *Kelautan dan Perikanan dalam Angka*. Jakarta: KKP RI; serta Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.

²Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta: KKP RI; Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Jakarta: BPS.

potensi lokal guna mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.³

Seiring dengan perkembangan ekonomi, sektor perikanan budidaya menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan produksi perikanan dan mengurangi tekanan terhadap perikanan tangkap. Budidaya tambak udang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tambak udang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka peluang kerja di wilayah pesisir.⁴

Dalam konteks administrasi publik, keberhasilan pengembangan usaha tambak udang tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan memberikan dukungan terhadap masyarakat. Penelitian Rahman dan Putri (2023) menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan penting sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam pengembangan sektor perikanan berbasis ekonomi lokal. Peran ini meliputi penyediaan infrastruktur, akses permodalan, pelatihan, serta penguatan kelembagaan masyarakat.⁵

Di sisi lain, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian Sari dan Hidayat (2023) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan ekonomi lokal, khususnya di wilayah pesisir.

³Badan Pusat Statistik. (2022). *Ketimpangan Regional dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: BPS; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.

⁴Food and Agriculture Organization. (2020). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*. Rome: FAO; Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: KKP RI.

⁵Rahman, A., & Putri, S. (2023). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Perikanan Berbasis Ekonomi Lokal*. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–58.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut.⁶

Desa Lam Lumpu Lhok yang berada di Kecamatan Peukan Bada merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha tambak udang. Kondisi geografis berupa estuari dengan sistem pasang surut air sangat mendukung kegiatan budidaya tambak. Sebagian masyarakat di wilayah ini telah memanfaatkan potensi tersebut sebagai sumber mata pencaharian.

Namun demikian, dalam pengembangannya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan akses modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan teknologi, serta lemahnya kelembagaan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat masih perlu dioptimalkan agar pengembangan usaha tambak udang dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk mengkaji bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip *New Public Service* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lam Lumpu Lhok Kecamatan Peukan Bada.

Selain itu, dalam konteks pembangunan daerah, pengembangan usaha tambak udang tidak dapat dilepaskan dari pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal (*local resource-based development*). Pendekatan ini menekankan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan keunggulan komparatif yang berbeda, sehingga strategi pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi spesifik wilayah tersebut. Dalam hal ini, wilayah pesisir seperti Desa Lam Lumpu Lhok di

⁶Sari, D., & Hidayat, R. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal di Wilayah Pesisir*. Jurnal Pembangunan Daerah, 15(2), 78–90.

Kecamatan Peukan Bada memiliki keunggulan pada sektor perikanan budidaya yang dapat dioptimalkan melalui kebijakan yang tepat dan dukungan kelembagaan yang kuat.⁷

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan usaha tambak udang masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan non-struktural. Dari sisi struktural, keterbatasan infrastruktur seperti saluran irigasi tambak, akses jalan distribusi, serta fasilitas pendukung lainnya menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas usaha tambak. Sementara itu, dari sisi non-struktural, permasalahan seperti rendahnya kapasitas manajerial masyarakat, keterbatasan akses informasi, serta lemahnya jejaring pemasaran turut mempengaruhi keberhasilan usaha tambak udang.⁸

Kerangka administrasi publik, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah daerah yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga partisipatif dan kolaboratif. Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan ekosistem kebijakan yang mendukung pengembangan usaha tambak udang melalui integrasi antara program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip “serve rather than steer” dalam New Public Service, di mana pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat yang mendorong kemandirian dan partisipasi warga.⁹

⁷Michael Porter. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). *Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Daerah*. Jakarta: Bappenas.

⁸Food and Agriculture Organization. (2020). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*. Rome: FAO; Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *Strategi Pengembangan Budidaya Udang Nasional*. Jakarta: KKP RI.

⁹Janet V. Denhardt, & Robert B. Denhardt. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: M.E. Sharpe.

Keberhasilan pengembangan usaha tambak udang juga sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan yang bersifat partisipatif akan mendorong munculnya rasa memiliki (*sense of ownership*) dari masyarakat terhadap program-program yang dijalankan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.¹⁰

Di sisi lain, aspek keberlanjutan (*sustainability*) juga menjadi perhatian penting dalam pengembangan usaha tambak udang. Praktik budidaya yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan ekosistem pesisir, pencemaran air, serta penurunan produktivitas tambak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah juga diperlukan dalam mengawasi dan mengatur praktik budidaya agar tetap sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.¹¹

Selain itu, dalam perspektif kesejahteraan masyarakat, pengembangan usaha tambak udang tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan semata, tetapi juga dari aspek lain seperti stabilitas ekonomi keluarga, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan harus bersifat holistik dan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata.¹²

¹⁰Sherry R. Arnstein. (1969). "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224; Robert Chambers. (1994). "The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal." *World Development*, 22(7), 953–969.

¹¹Food and Agriculture Organization. (2020). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*. Rome: FAO; United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: UN.

¹²United Nations Development Programme. (2020). *Human Development Report 2020*. New York: UNDP; Amartya Sen. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang di Desa Lam Lumpu Lhok serta bagaimana implementasi prinsip-prinsip New Public Service dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara peran pemerintah, partisipasi masyarakat, dan hasil pembangunan dalam konteks ekonomi lokal berbasis sektor perikanan.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan peukan bada desa lam lumpu lhok?
2. Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan peukan bada desa lam lumpu lhok?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan usaha tambak udang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas peran pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sektor perikanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam merumuskan serta mengevaluasi kebijakan dan program pengembangan usaha tambak udang, sehingga peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
- b. Bagi Masyarakat Pembudidaya Tambak Udang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang serta menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan usaha tambak secara lebih produktif dan berkelanjutan.

- c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah, pengembangan usaha tambak udang, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam kajian pustaka yang berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan saat ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) serta memperkuat landasan empiris penelitian. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik pengembangan usaha tambak udang dan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan oleh berbagai peneliti, baik dari perspektif ekonomi, agribisnis, maupun administrasi publik.¹³

Penelitian yang mengkaji tentang kesejahteraan petani tambak udang vaname di Desa Sialang Buah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha tambak udang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, usaha tambak juga berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi keluarga. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi Islam dan belum mengkaji secara mendalam peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan usaha tambak tersebut.¹⁴

¹³John W. Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications; Uma Sekaran, & Roger Bougie. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). Chichester: Wiley.

¹⁴Andini, R., Sugianto, & Tambunan, H. (2024). *Analisis Kesejahteraan Petani Tambak Udang Vaname di Desa Sialang Buah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 10(1), 55–70.

Selanjutnya, penelitian mengenai dinamika peran usaha tambak udang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pesawaran menunjukkan bahwa usaha tambak udang mampu meningkatkan perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, penelitian ini lebih fokus pada dampak ekonomi dan belum mengaitkan secara spesifik dengan pendekatan administrasi publik, khususnya dalam konteks peran pemerintah daerah dan pelayanan publik.¹⁵

Penelitian lain yang dilakukan membahas tentang manajemen risiko dalam rantai pasok tambak udang vaname. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan usaha tambak tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola risiko, termasuk risiko lingkungan, pasar, dan distribusi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam aspek manajerial, namun belum menyoroti bagaimana kebijakan pemerintah daerah berperan dalam mengatasi risiko-risiko tersebut.¹⁶

Dari perspektif administrasi publik, penelitian mengkaji peran pemerintah daerah dalam pengembangan sektor perikanan berbasis ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam pembangunan sektor perikanan. Peran ini meliputi penyusunan kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan

¹⁵Zaki, M., Pratama, R., & Lestari, D. (2024). *Dinamika Peran Usaha Tambak Udang dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Pesawaran*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 101–115.

¹⁶Fauziyah, N., Faiha, M., & Triyasari, D. (2024). *Manajemen Risiko dalam Rantai Pasok Tambak Udang Vaname*. *Jurnal Agribisnis dan Manajemen*, 11(2), 88–102.

dilakukan, namun belum secara spesifik mengkaji sektor tambak udang sebagai objek penelitian.¹⁷

Selanjutnya, penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal di wilayah pesisir menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pembangunan. Penelitian ini menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dapat meningkatkan efektivitas program serta keberlanjutan hasil pembangunan. Namun demikian, penelitian ini belum mengaitkan partisipasi masyarakat dengan pendekatan teori administrasi publik tertentu, seperti *New Public Service*.¹⁸

Selain itu, secara konseptual, pendekatan *New Public Service* yang dikembangkan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melayani masyarakat, mendorong partisipasi publik, serta membangun kolaborasi antara pemerintah dan warga negara. Pendekatan ini menjadi relevan dalam konteks pengembangan usaha tambak udang, karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan.¹⁹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek ekonomi dan teknis dari usaha tambak udang, seperti peningkatan pendapatan, manajemen usaha, serta

¹⁷Rahman, A., & Putri, S. (2023). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Perikanan Berbasis Ekonomi Lokal*. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 45–58.

¹⁸Sari, D., & Hidayat, R. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal di Wilayah Pesisir*. Jurnal Pembangunan Daerah, 15(2), 78–90.

¹⁹Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: M.E. Sharpe.

risiko produksi. Sementara itu, kajian yang menyoroti peran pemerintah daerah dalam perspektif administrasi publik, khususnya dengan menggunakan pendekatan New Public Service, masih relatif terbatas.

Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan antara peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam satu kerangka analisis yang komprehensif juga masih jarang ditemukan. Padahal, ketiga aspek tersebut merupakan elemen penting dalam pembangunan berbasis masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang jelas dalam mengisi kekosongan penelitian sebelumnya, yaitu dengan mengkaji peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang dengan menggunakan perspektif New Public Service serta melihat dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga akan mengintegrasikan aspek partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi lokal.

2.2 LandasanTeori

Landasan teori merupakan bagian penting dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai dasar konseptual dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Melalui landasan teori, peneliti dapat menjelaskan konsep, variabel, serta hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian secara sistematis dan ilmiah. Dalam penelitian ini, landasan teori difokuskan pada beberapa konsep utama dalam Ilmu Administrasi Negara, yaitu konsep administrasi publik, peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, pengembangan usaha tambak udang, serta konsep kesejahteraan masyarakat. Teori-teori tersebut digunakan untuk memberikan

kerangka analisis dalam memahami bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁰

2.2.1 Teori Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik untuk mencapai tujuan negara melalui pengelolaan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Menurut Dwight Waldo, administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan organisasi pemerintah, tetapi juga menyangkut nilai-nilai demokrasi, etika, dan kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi publik memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek manajerial sekaligus normatif.²¹

Selanjutnya, Nicholas Henry menjelaskan bahwa administrasi publik mengalami perkembangan paradigma, mulai dari Old Public Administration, New Public Management, hingga New Public Service. Perkembangan ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang dalam melihat peran pemerintah dalam masyarakat.²²

Dalam konteks penelitian ini, administrasi publik menjadi landasan utama untuk memahami bagaimana pemerintah daerah menjalankan perannya dalam

²⁰John W. Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications; Janet V. Denhardt, & Robert B. Denhardt. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: M.E. Sharpe; Amartya Sen. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.

²¹Waldo, D. (1948). *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. New York: Ronald Press.

²²Henry, N. (2013). *Public Administration and Public Affairs* (12th ed.). Boston: Pearson Education.

pengembangan usaha tambak udang sebagai bagian dari pelayanan publik dan pembangunan ekonomi masyarakat.

2.2.2 Teori Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan aktor penting dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. pemerintah daerah memiliki fungsi utama sebagai pelayan masyarakat, penggerak pembangunan, dan pemberdaya masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal dapat diklasifikasikan menjadi beberapa fungsi, yaitu :²³

1. Sebagai regulator, pemerintah daerah berperan dalam menyusun, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan, kebijakan, serta ketentuan yang mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Peran ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, menjaga ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga setiap pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemberdayaan UMKM, mengatur sistem perizinan usaha, menetapkan aturan pemanfaatan ruang usaha, serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap standar kesehatan, keamanan, dan lingkungan.
2. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah berperan menyediakan berbagai sarana, prasarana, dan layanan yang mendukung kegiatan ekonomi

²³Rondinelli Dennis A.. (1983). *Development Projects as Policy Experiments: An Adaptive Approach to Development Administration*. London: Methuen; Arsyad Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

masyarakat agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain menyediakan infrastruktur, pemerintah juga memfasilitasi akses masyarakat terhadap permodalan, teknologi, informasi, dan pemasaran sehingga pelaku usaha memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang. Contohnya, pemerintah daerah membangun pasar tradisional, memperbaiki infrastruktur jalan menuju sentra produksi, menyediakan bantuan peralatan usaha, memfasilitasi pelatihan pemasaran digital, serta membantu pelaku UMKM mengikuti pameran produk di tingkat daerah maupun nasional.

3. Sebagai katalisator, pemerintah daerah berperan mempercepat pembangunan ekonomi melalui berbagai program, kebijakan, dan inovasi yang mampu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat. Dalam menjalankan peran ini, pemerintah menjadi penggerak yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai pihak, seperti investor, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan sektor swasta, sehingga potensi ekonomi daerah dapat berkembang secara optimal. Contohnya, pemerintah daerah melaksanakan program pengembangan kawasan ekonomi, memberikan insentif investasi, mengembangkan desa wisata, membentuk pusat inkubasi bisnis, serta menjalankan program digitalisasi UMKM untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
4. Sebagai pemberdaya masyarakat, pemerintah daerah berperan meningkatkan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat agar mampu mengelola potensi ekonomi secara berkelanjutan. Pemberdayaan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan,

pendampingan, penguatan kelembagaan, serta pemberian akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan sehingga masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Contohnya, pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, memberikan pendampingan kepada kelompok usaha, membentuk koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memberikan pelatihan pengelolaan keuangan, serta membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal dan perizinan usaha.

Dalam konteks pengembangan usaha tambak udang, peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya usaha masyarakat, baik melalui kebijakan, bantuan teknis, maupun akses terhadap sumber daya.

2.2.3 Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui “ladder of citizen participation” yang menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat memiliki beberapa bentuk, antara lain : ²⁴

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, perumusan, dan penetapan kebijakan atau program pembangunan. Partisipasi ini memberikan

²⁴Sherry R. Arnstein. (1969). “A Ladder of Citizen Participation.” *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224; Robert Chambers. (1994). “The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal.” *World Development*, 22(7), 953–969.

kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, gagasan, dan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan serta potensi yang dimiliki. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, mencerminkan kepentingan masyarakat, serta meningkatkan rasa memiliki terhadap program yang akan dilaksanakan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan program merupakan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan, mendukung, dan menyukseskan berbagai program atau kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Partisipasi ini mencerminkan kesediaan masyarakat untuk memberikan kontribusi berupa tenaga, waktu, pemikiran, keterampilan, maupun sumber daya lainnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Keterlibatan masyarakat pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, memperkuat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara optimal.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan keterlibatan masyarakat dalam menggunakan, mengelola, memelihara, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan yang telah diwujudkan. Partisipasi ini bertujuan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain memanfaatkan hasil pembangunan, masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran untuk menjaga dan memelihara berbagai fasilitas maupun program yang telah

diberikan sehingga manfaatnya dapat berlangsung dalam jangka panjang serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

4. Partisipasi dalam evaluasi program merupakan keterlibatan masyarakat dalam menilai, mengawasi, dan memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan maupun hasil suatu program pembangunan. Melalui partisipasi ini, masyarakat dapat memberikan penilaian mengenai tingkat keberhasilan program, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, serta menyampaikan saran untuk perbaikan program pada masa mendatang. Partisipasi dalam evaluasi juga bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan sehingga program yang dijalankan dapat terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Partisipasi yang tinggi akan meningkatkan efektivitas program pembangunan karena masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap program tersebut.

2.2.3 Teori Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen penting dalam organisasi yang berperan sebagai penggerak utama dalam mencapai tujuan. SDM tidak hanya dipandang sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai aset strategis yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan potensi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Dalam perspektif awal, teori klasik yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor menempatkan manusia sebagai faktor produksi yang harus diatur secara sistematis untuk mencapai efisiensi kerja yang maksimal. Pendekatan ini

menekankan pada standarisasi kerja, pembagian tugas, dan pengawasan ketat guna meningkatkan produktivitas, meskipun cenderung mengabaikan aspek psikologis dan sosial pekerja.²⁵

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan munculnya teori hubungan manusia yang menyoroti pentingnya faktor sosial dan emosional dalam lingkungan kerja. Melalui eksperimen Hawthorne, ditemukan bahwa perhatian terhadap karyawan, hubungan interpersonal, serta kondisi kerja yang nyaman dapat meningkatkan produktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa manusia bukan sekadar alat produksi, melainkan individu yang memiliki kebutuhan sosial dan psikologis yang harus diperhatikan.²⁶

Selanjutnya, teori yang memperkuat pemahaman tentang kebutuhan manusia dalam bekerja melalui konsep hierarki kebutuhan. bahwa individu memiliki lima tingkatan kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Dalam konteks organisasi, pemenuhan kebutuhan ini menjadi kunci untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Sejalan dengan itu, teori dua faktor yang membedakan antara faktor higienis dan faktor motivator. Faktor higienis seperti gaji dan kondisi kerja berfungsi mencegah ketidakpuasan, sedangkan faktor motivator seperti penghargaan dan pencapaian berperan dalam meningkatkan kepuasan kerja.²⁷

²⁵Taylor, F. W. (1911). *The Principles of Scientific Management*. New York: Harper & Brothers

²⁶Elton Mayo. (1933). *The Human Problems of an Industrial Civilization*. New York: Macmillan; Fritz J. Roethlisberger, & William J. Dickson. (1939). *Management and the Worker*. Cambridge: Harvard University Press.

²⁷Abraham Maslow. (1943). "A Theory of Human Motivation." *Psychological Review*, 50(4), 370–396; Frederick Herzberg. (1959). *The Motivation to Work*. New York: John Wiley & Sons.

Selain itu, teori X dan Y yang memberikan perspektif mengenai asumsi manajemen terhadap karyawan. Teori X menganggap bahwa manusia cenderung malas dan perlu diawasi secara ketat, sedangkan teori Y beranggapan bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang, bertanggung jawab, dan termotivasi secara intrinsik. Pendekatan ini memengaruhi gaya kepemimpinan dan kebijakan manajemen dalam organisasi.²⁸

Dalam perkembangan modern, manajemen SDM tidak lagi hanya berfokus pada pengelolaan tenaga kerja, tetapi juga pada pengembangan kompetensi, manajemen talenta, serta peningkatan keterlibatan karyawan (employee engagement). SDM dipandang sebagai aset strategis yang mampu memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk mengelola SDM secara efektif melalui perencanaan, pelatihan, pengembangan, serta sistem penghargaan yang tepat guna mencapai kinerja optimal.²⁹

Usaha tambak udang merupakan salah satu bentuk kegiatan budidaya perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pengembangan usaha tambak bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan, pendapatan masyarakat, serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Pengembangan usaha tambak udang meliputi beberapa aspek, yaitu:

²⁸Douglas McGregor. (1960). *The Human Side of Enterprise*. New York: McGraw-Hill.

²⁹Gary Dessler. (2020). *Human Resource Management* (16th ed.). Pearson Education; David Ulrich. (1997). *Human Resource Champions*. Boston: Harvard Business School Press.

1. Penyediaan sarana dan prasarana tambak merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai fasilitas fisik yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan budidaya tambak agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana tersebut meliputi infrastruktur yang mendukung proses produksi, distribusi, serta pengelolaan hasil budidaya. Penyediaan fasilitas yang memadai bertujuan meningkatkan produktivitas tambak, mengurangi hambatan operasional, memperlancar aktivitas budidaya, serta menciptakan kondisi usaha yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan.
2. Penyediaan benur berkualitas merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan benur yang memiliki mutu genetik, kesehatan, dan tingkat kelangsungan hidup yang baik sehingga mampu menghasilkan produktivitas budidaya yang optimal. Benur yang berkualitas menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan usaha tambak karena berpengaruh terhadap pertumbuhan, ketahanan terhadap penyakit, serta tingkat hasil panen. Oleh karena itu, pemerintah berperan dalam memastikan bahwa benur yang digunakan oleh pembudidaya telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan keberhasilan usaha budidaya.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan teknis, serta wawasan para pembudidaya tambak agar mampu mengelola usaha budidaya secara lebih profesional. Peningkatan kapasitas ini bertujuan membentuk

sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menerapkan teknologi budidaya, mengelola usaha secara efisien, menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pasar sehingga produktivitas dan daya saing usaha tambak dapat terus meningkat.

4. Akses terhadap modal dan pasar merupakan upaya pemerintah dalam mempermudah pembudidaya memperoleh sumber pembiayaan serta memperluas jaringan pemasaran hasil budidaya. Kemudahan akses terhadap modal memungkinkan pembudidaya memenuhi kebutuhan investasi maupun operasional usaha, sedangkan akses terhadap pasar memberikan peluang yang lebih luas untuk memasarkan hasil produksi dengan nilai ekonomi yang lebih baik. Dukungan terhadap aspek permodalan dan pemasaran bertujuan meningkatkan keberlanjutan usaha, memperkuat daya saing produk, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya tambak.
5. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan upaya pemerintah dalam mendorong pengelolaan kegiatan budidaya tambak yang memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan pelestarian lingkungan. Pengelolaan yang berkelanjutan bertujuan menjaga kualitas air, tanah, dan ekosistem di sekitar kawasan tambak agar tetap mendukung kegiatan budidaya dalam jangka panjang. Selain itu, upaya ini juga diarahkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan, serta

mewujudkan sistem budidaya yang produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Pengembangan usaha tambak udang yang optimal akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.³⁰

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, baik secara material maupun non-material. kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

Indikator kesejahteraan masyarakat meliputi:

1. Tingkat pendapatan merupakan kondisi yang menunjukkan besarnya penghasilan yang diperoleh individu atau rumah tangga dalam suatu periode tertentu sebagai hasil dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Tingkat pendapatan menjadi salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat karena mencerminkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup, memenuhi kebutuhan keluarga, serta menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
2. Kesempatan kerja merupakan kondisi yang menunjukkan tersedianya peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan atau menciptakan usaha yang mampu menghasilkan pendapatan. Kesempatan kerja menjadi

³⁰Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *Strategi Pengembangan Budidaya Udang Nasional*. Jakarta: KKP RI; Food and Agriculture Organization. (2020). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*. Rome: FAO.

indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan karena semakin luas peluang kerja yang tersedia, semakin besar kemungkinan masyarakat memperoleh penghasilan yang layak. Peningkatan kesempatan kerja juga berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di suatu wilayah.

3. Akses terhadap pendidikan merupakan kemampuan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang mudah dijangkau, baik dari segi ketersediaan, keterjangkauan biaya, maupun kualitas layanan yang diberikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan maupun dunia kerja. Semakin baik akses masyarakat terhadap pendidikan, semakin besar peluang untuk meningkatkan produktivitas, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang.
4. Akses terhadap layanan kesehatan merupakan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, berkualitas, mudah dijangkau, dan terjangkau dari segi biaya. Akses terhadap layanan kesehatan menjadi salah satu indikator kesejahteraan karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menjaga kondisi kesehatan, mencegah penyakit, serta memperoleh penanganan medis yang diperlukan. Ketersediaan layanan kesehatan yang baik akan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, menjaga produktivitas kerja, serta menurunkan

risiko berbagai permasalahan kesehatan yang dapat memengaruhi kesejahteraan.

5. Kualitas hidup secara umum merupakan kondisi yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh yang mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, keamanan, lingkungan, serta kemampuan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Kualitas hidup tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat menikmati kehidupan yang layak, aman, sehat, produktif, dan berkelanjutan. Semakin baik kualitas hidup yang dimiliki masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai baik pada tingkat individu, keluarga, maupun komunitas secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, kesejahteraan masyarakat digunakan sebagai variabel outcome untuk melihat dampak dari pengembangan usaha tambak udang yang didukung oleh peran pemerintah daerah.³¹

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang di sintesiskandari fakta-fakta, observasi dan telaah keperpustakaan. Oleh karena itu, kerangka berfikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian dalam kerangka berfikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel penelitian. Variabel-variabel penelitian

³¹United Nations Development Programme. (2020). *Human Development Report 2020*. New York: UNDP; Amartya Sen. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.

menjelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran dalam penelitian adalah sebagai berikut:³²



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

³²Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta; John W. Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif berdasarkan analisis kualitatif. Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang diselidiki melalui pengamatan, dengan tujuan untuk menggambarakan situasi objek penelitian pada saat ini berdasarkan informasi yang terlihat atau seperti yang ada³³. metode deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mendasarkan pada filsafat postpositivisme. Pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki situasi objek yang bersifat alamiah (sebagai lawan dari eksperimen). Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrument utama dalam mengumpulkan data melalui Teknik triangulasi yang menggabungkan berbagai sumber informasi. Analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian jenis ini lebih menitikberatkan pada pemahaman makna daripada upaya generalisasi.³⁴

Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif didasari oleh tujuan untuk merinci, menjelaskan, dan menyelidiki dengan mendalam tentang kondisi yang akan di amati di lapangan. Dalam upaya ini, peneliti berusaha menguraikan dengan lebih spesifik, jelas, dan mendalam

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 3.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 18.

mengenai situasi atau peristiwa tertentu. Sebagai hasil dari penelitian ini, data yang terkumpul memiliki sifat deskriptif yang berguna untuk mengidentifikasi dampak



usaha tambak udang terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lam Lumpu Kecamatan Peukan Bada.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang dengan mengacu pada indikator dari Rasyid,Ryaas. Model ini menyoroti aspek regulator, fasilitator, motivator, dinamisator Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana peran pemerintah diterapkan secara efektif dan berdampak pada pengembangan usaha tambak udang.

Tabel 3. 1 Indikator Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Peran pemerintah daerah	a. Kebijakandan pengawasan usaha tambak b. Bantuan sarana dan pelatihan c. Pembinaan dan dorongan usaha d. Kerjasama dan pengembangan jaringan e. Produksi,modal,teknologi,dan pemasaran f. Pendapatan,pekerjaan,pendidikan,dan kesehatan	Rasyid, Ryaas.2000.

Berdasarkan Tabel 3.1 penelitian ini menggunakan variabel peran pemerintah daerah yang diukur melalui enam indikator, yaitu kebijakan dan pengawasan usaha tambak, bantuan sarana dan pelatihan, pembinaan dan dorongan usaha, kerja sama dan pengembangan jaringan, dukungan terhadap produksi, permodalan, teknologi, dan pemasaran, serta peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Keenam indikator tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah menjalankan perannya dalam mendukung pengembangan usaha tambak udang sehingga dapat berkontribusi

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penentuan indikator dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid (2000) yang kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang di Gampong Lam Lumpu Lhok, Kecamatan Peukan Bada.

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah dimana aktivitas peneliti dilaksanakan. Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk memudahkan dan mengklarifikasi daerah yang menjadi fokus dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Lam Lumpu Lhok Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Alasan memilih lokasi di Desa Lam Lumpu Lhok Kecamatan Peukan Bada karena ayah peneliti berprofesi sebagai petani tambak sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana dampak pengembangan usaha tambak udang bagi masyarakat sekitar.

Tabel 3. 2 Profil Singkat Lokasi Penelitian

No	Uraian	Keterangan
1	Nama Desa	Lam Lumpu Lhok
2	Kecamatan	Peukan Bada
3	Kabupaten	Aceh Besar
4	Provinsi	Aceh
5	Objek Penelitian	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Tambak Udang untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
6	Karakteristik Wilayah	Wilayah pesisir yang sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pembudidaya tambak udang

7	Alasan Pemilihan Lokasi	Desa Lam Lumpu Lhok merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi usaha tambak udang dan menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang terhadap kesejahteraan masyarakat.
---	-------------------------	--

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data yang di kumpulkan oleh seorang peneliti harus dilihat dari sumbernya.

Secara garis besar, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara, berupa pandangan, persepsi, dan tanggapan terkait dengan topik penelitian ini. Pendekatan wawancara digunakan bertujuan menggali pandangan, persepsi, dan tanggapan responden terhadap isu yang diteliti³⁵

b. Data Sekunder

Data Sekunder merujuk pada informasi yang di kumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah di olah sebelumnya, seperti dokumen atau materi tertulis lainnya yang relevan pada objek penelitian tentang

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 296.

Dampak Pengembangan Usaha Tambak Udang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lam Lumpu Lhok Kecamatan Pekan Bada.³⁶

3.5 Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki kredibilitas sebagai sumber informasi telah memiliki pemanahaman mendalam terkait isu yang diteliti yakni Dampak Pengembangan Usaha Tambak Udang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lam Lumpu Lhok Kecamatan Pekan Bada. Dalam hal ini dinas terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah gampong Lam Lumpu Lhok Kecamatan Pekan Bada Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 3. 3 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Ka. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Besar	1
2	Geuchik Gampong Lam Lumpu Lhok	1
3	Pengusaha Tambak	2
4	Masyarakat	2
Jumlah		6

Sumber : Data diolah Peneliti Tahun 2026

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Ada beragam metode pengumpulan data yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian ini, yakni observasi, wawancara, dan pengumpulan data dari dokumen. Ketiga teknik tersebut diimplementasikan dengan tujuan memperoleh informasi dan data yang tepat dan relevan dalam kerangka penelitian ini.

1. Observasi

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 157.

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”* melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dibagi menjadi tiga bagian, observasi partisipatif yaitu peneliti dalam melakukan observasinya ikut melibatkan diri kedalam kehidupan sosial sehari-hari di lokasi penelitian. Dalam observasi partisipatif terdapat sikap peneliti yang berbeda-beda.³⁷

Observasi terstruktur atau tersamar, peneliti berterus terang bahwa dirinya sedang melakukan penelitian, dan hal itu diketahui oleh masyarakat atau orang-orang yang sedang diteliti, sejak awal, dari datang hingga selesainya penelitian. Observasi tak berstruktur, dalam penelitian kualitatif, observasi dilakukan secara acak dan multidimensi sehingga tidak memerlukan penjadwalan yang tetap. Bahkan, fokus penelitian dapat berubah bergantung pada hasil penjelajahan umum di lokasi penelitian. Peneliti melakukan penjajakan dan eksplorasi ke lokasi penelitian dan mencari serta memerhatikan apa yang ada serta gejala yang tampak pada sistematisa dan persiapan yang terstruktur.³⁸

2. Wawancara

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 106–108.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 310–313.

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung. Menurut Patton, dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara, interviu dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingat peneliti (pewawancara) mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah di bahas atau ditanyakan.³⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalkan catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Study dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186–190.

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁰ Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Tapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu. Demikian juga autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri,seringsubyektif.⁴¹

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menentukan metode analisa data yang akan digunakan adalah model Miles dan Huberman, yaitu aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisa data, yaitu data reduction, data *display*, dan *conclusion* (penarikan kesimpulan).⁴²

a. Data *reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 314.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 315.

⁴² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: Sage Publications, 1994), hlm. 10–12.

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reproduksi data.⁴³

b. Data *display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teknik yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴⁴

c. *Conclusion* (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 323.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 325.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Gampong Lam Lumpu Lhok

Gampong Lam Lumpu Lhok merupakan salah satu gampong yang terletak di wilayah Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Gampong ini berada pada wilayah pesisir yang memiliki potensi sumber daya alam, terutama di sektor perikanan dan kelautan. Kondisi geografis yang dekat dengan laut menjadikan masyarakat sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan pembudidaya tambak, termasuk usaha tambak udang.

1. Letak Geografis

Secara geografis, Gampong Lam Lumpu Lhok terletak di wilayah pesisir Kecamatan Peukan Bada yang berbatasan langsung dengan kawasan perairan laut. Letaknya yang strategis di pesisir pantai menjadikan wilayah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha perikanan budidaya, khususnya tambak udang.

2. Batas Wilayah

Adapun batas wilayah Gampong Lam Lumpu Lhok adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah perairan laut
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan penduduk lainnya di Kecamatan Peukan Bada

- c) Sebelah Timur berbatasan dengan lahan pertanian dan permukiman masyarakat
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah pesisir dan laut lepas
- e) Batas wilayah ini menunjukkan bahwa gampong ini memiliki karakteristik wilayah campuran antara pesisir dan daratan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

3. Luas Wilayah

Gampong Lam Lumpu Lhok memiliki luas wilayah yang relatif sedang dengan pemanfaatan lahan yang didominasi oleh pemukiman, tambak, dan sebagian kecil lahan pertanian. Sebagian besar lahan produktif digunakan untuk kegiatan budidaya perikanan, termasuk tambak udang yang menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat.

4. Kondisi Alam

Kondisi alam Gampong Lam Lumpu Lhok sangat dipengaruhi oleh wilayah pesisir dengan karakteristik tanah yang cocok untuk tambak. Ketersediaan air payau menjadi faktor pendukung utama dalam pengembangan usaha tambak udang. Namun demikian, kondisi alam juga memiliki tantangan seperti perubahan cuaca, pasang surut air laut, serta risiko pencemaran lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil produksi tambak.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Tambak Udang

1. Peran sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator merupakan fungsi pemerintah dalam menyusun kebijakan, menetapkan aturan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha masyarakat. Dalam konteks pengembangan usaha tambak udang, peran ini sangat penting untuk memastikan kegiatan budidaya berjalan sesuai ketentuan, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan agar berbagai kendala yang muncul dalam kegiatan usaha dapat diatasi secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahri selaku masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Informan menyampaikan bahwa dukungan berupa bantuan maupun program langsung dari pemerintah masih sangat terbatas, sehingga masyarakat lebih banyak mengelola usaha secara mandiri.

“Dalam dua tahun terakhir belum ada bantuan yang berarti dari pemerintah. Kami mengelola tambak secara mandiri menggunakan modal sendiri. Walaupun begitu usaha tambak tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.”⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Fahri, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh M. Yahya selaku masyarakat, yang menjelaskan bahwa pengawasan dari pemerintah masih ada, namun tidak dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat lebih banyak mengandalkan pengalaman sendiri dalam mengelola tambak.

*"Pengawasan memang ada, tapi tidak sering. Kami biasanya mengelola tambak berdasarkan pengalaman sendiri saja karena jarang ada pendampingan langsung dari pemerintah."*⁴⁶

Sementara itu, Ramli selaku masyarakat menyatakan bahwa pada periode sebelumnya pemerintah daerah sempat menjalankan fungsi regulator melalui pengawasan dan pembinaan kepada kelompok usaha tambak. Selain itu, bantuan dan penyuluhan juga pernah diberikan dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku usaha.

*"Pemerintah pernah melakukan pengawasan terhadap usaha tambak dan memberikan bantuan melalui kelompok-kelompok usaha. Selain itu, ada juga penyuluhan dan pembinaan untuk mendukung pengembangan usaha tambak udang."*⁴⁷

Berbeda dengan pandangan masyarakat, Henri Zakariya selaku masyarakat lainnya menjelaskan bahwa keberadaan aturan dan arahan dari pemerintah tetap dirasakan, terutama dalam bentuk imbauan terkait pengelolaan lingkungan tambak dan keberlanjutan usaha. Namun, implementasi di lapangan masih belum optimal.

⁴⁶ Wawancara dengan M. Yahya, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁴⁷ Wawancara dengan Ramli, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

"Ada arahan dari pemerintah tentang cara mengelola tambak yang baik dan menjaga lingkungan, tapi pelaksanaannya di lapangan belum terlalu maksimal."⁴⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Muhifuddin selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar. Beliau menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui penyuluh perikanan yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan langsung kepada pembudidaya di lapangan. Penyuluh juga berperan dalam membantu menyelesaikan permasalahan teknis yang dihadapi petambak.

"Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyuluh perikanan yang turun langsung ke lapangan. Penyuluh memberikan pendampingan kepada pembudidaya serta membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam kegiatan budidaya."⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa peran pemerintah daerah sebagai regulator dalam pengembangan usaha tambak udang di Gampong Lam Lumpu Lhok masih berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Pemerintah tetap melaksanakan fungsi pengawasan melalui penyuluh perikanan, akan tetapi intensitas pendampingan yang dirasakan masyarakat masih terbatas.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah menilai bahwa fungsi

⁴⁸ Wawancara dengan Henri Zakariya, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁴⁹ Wawancara dengan Muhifuddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, 16 Juni 2026.

pengawasan dan pembinaan telah berjalan sesuai mekanisme yang ada, sedangkan masyarakat merasakan bahwa keterlibatan tersebut masih kurang intensif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas peran regulator tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Peran regulator yang dijalankan pemerintah daerah tetap memiliki kontribusi penting dalam menjaga keberlanjutan usaha tambak udang, terutama dalam aspek teknis budidaya seperti pengendalian penyakit, peningkatan produktivitas, serta penerapan teknik budidaya yang baik. Dengan demikian, fungsi regulator menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung pengembangan usaha tambak udang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Gampong Lam Lumpu Lhok.⁶

2. Peran sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator merupakan fungsi pemerintah dalam menyediakan berbagai bentuk dukungan yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengembangkan usaha, seperti bantuan sarana dan prasarana, akses permodalan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha. Dalam pengembangan usaha tambak udang, peran ini menjadi penting karena keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masyarakat, tetapi juga oleh dukungan fasilitas dan sumber daya dari pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahri selaku masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir masyarakat belum menerima bantuan sarana maupun prasarana yang signifikan dari pemerintah daerah. Informan menyampaikan bahwa kegiatan usaha tambak lebih banyak dijalankan secara mandiri menggunakan modal pribadi.

"Dalam dua tahun terakhir belum ada bantuan sarana maupun prasarana dari pemerintah. Kami menjalankan usaha tambak secara mandiri dengan modal sendiri."⁵⁰

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh M. Yahya selaku masyarakat, yang menjelaskan bahwa masyarakat belum mendapatkan akses bantuan permodalan maupun fasilitas usaha yang memadai dari pemerintah, sehingga pengembangan usaha dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing pelaku usaha.

"Untuk bantuan modal atau fasilitas usaha dari pemerintah belum terlalu terasa. Kami mengembangkan tambak sesuai kemampuan sendiri."⁵¹

Berbeda dengan pandangan tersebut, Ramli selaku masyarakat menyampaikan bahwa pada periode sebelumnya pemerintah daerah pernah memberikan dukungan dalam bentuk bantuan sarana produksi dan dilakukan melalui kelompok usaha tambak. Menurutnya, mekanisme penyaluran melalui kelompok dianggap lebih terstruktur.

⁵⁰ Wawancara dengan Fahri, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁵¹ Wawancara dengan M. Yahya, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

"Pemerintah pernah memberikan bantuan sarana dan prasarana melalui kelompok usaha tambak. Biasanya disalurkan melalui ketua kelompok."⁵²

Henri Zakariya selaku masyarakat juga menambahkan bahwa bentuk fasilitasi dari pemerintah pernah dirasakan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan, meskipun tidak dilakukan secara rutin. Pendampingan tersebut membantu masyarakat dalam memahami teknik budidaya yang lebih baik.

"Pernah ada pendampingan dan penyuluhan dari pemerintah, tapi tidak rutin. Itu cukup membantu kami dalam mengelola tambak."⁵³

Sementara itu, Muhifuddin selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap menjalankan fungsi fasilitasi melalui pemberian bantuan benih, pakan, serta pendampingan teknis kepada pembudidaya. Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi intensitas pemberian bantuan.

"Pemerintah daerah memberikan bantuan berupa benih dan pakan serta pendampingan melalui penyuluh. Namun memang pelaksanaannya belum maksimal karena keterbatasan anggaran."⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam pengembangan usaha tambak udang di Gampong Lam Lumpu Lhok masih belum optimal. Meskipun

⁵² Wawancara dengan Ramli, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁵³ Wawancara dengan Henri Zakariya, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁵⁴ Wawancara dengan Muhifuddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, 16 Juni 2026.

terdapat upaya bantuan berupa sarana produksi dan pendampingan, masyarakat masih merasakan minimnya dukungan yang berkelanjutan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa bantuan pemerintah cenderung bersifat periodik dan lebih banyak disalurkan melalui kelompok usaha, bukan secara individu. Hal ini menyebabkan tidak semua pelaku usaha merasakan manfaat secara langsung. Di sisi lain, keterbatasan anggaran pemerintah daerah juga menjadi faktor yang membatasi jangkauan program fasilitasi.

Peran fasilitator yang dijalankan pemerintah daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam mengelola usaha tambak udang. Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada keberlanjutan program, pemerataan distribusi bantuan, serta intensitas pendampingan di lapangan. Dengan demikian, penguatan peran fasilitator masih diperlukan agar pengembangan usaha tambak udang dapat memberikan dampak yang lebih maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Lam Lumpu Lhok.⁶

3. Peran sebagai Motivator

Peran pemerintah sebagai motivator merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dorongan, semangat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi usaha yang dimiliki. Dalam konteks pengembangan usaha tambak udang, peran ini penting untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam mengelola usaha secara lebih produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahri selaku masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, diketahui bahwa dorongan atau motivasi dari pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir belum terlalu dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Informan menyampaikan bahwa masyarakat lebih banyak mengembangkan usaha berdasarkan inisiatif sendiri.

"Selama ini kami lebih banyak menjalankan usaha tambak secara mandiri. Dorongan dari pemerintah tidak terlalu terasa secara langsung."⁵⁵

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh M. Yahya selaku masyarakat, yang menjelaskan bahwa motivasi dari pemerintah lebih bersifat umum melalui himbauan, namun belum disertai dengan pendampingan intensif yang dapat mendorong peningkatan usaha secara nyata.

"Ada himbauan dari pemerintah untuk mengembangkan usaha tambak, tapi belum ada dorongan yang benar-benar rutin atau mendampingi secara langsung."⁵⁶

Sementara itu, Ramli selaku masyarakat menyampaikan bahwa pada masa sebelumnya pemerintah daerah pernah memberikan motivasi kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pertemuan kelompok usaha tambak. Kegiatan tersebut mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengelola usaha tambak udang.

"Pemerintah pernah memberikan penyuluhan dan motivasi kepada kelompok tambak agar usaha mereka bisa berkembang."⁵⁷

⁵⁵ Wawancara dengan Fahri, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁵⁶ Wawancara dengan M. Yahya, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁵⁷ Wawancara dengan Ramli, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

Henri Zakariya selaku masyarakat juga menambahkan bahwa dorongan pemerintah terlihat dalam bentuk ajakan untuk meningkatkan produksi dan menjaga keberlanjutan usaha, meskipun pelaksanaannya tidak dilakukan secara berkelanjutan.

"Pemerintah pernah mengajak masyarakat untuk meningkatkan hasil tambak dan menjaga usaha supaya tetap berjalan."⁵⁸

Sementara itu, Muhifuddin selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar menjelaskan bahwa pemerintah daerah berupaya memberikan motivasi kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan, serta sosialisasi program-program perikanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam mengembangkan usaha tambak udang.

"Kami melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan dorongan agar usaha tambak dapat berkembang lebih baik."⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa peran pemerintah daerah sebagai motivator dalam pengembangan usaha tambak udang di Gampong Lam Lumpu Lhok belum berjalan secara maksimal. Meskipun terdapat kegiatan penyuluhan dan himbauan, masyarakat masih merasakan bahwa dorongan yang diberikan belum cukup kuat untuk meningkatkan semangat dan kapasitas usaha secara berkelanjutan.

⁵⁸ Wawancara dengan Henri Zakariya, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁵⁹ Wawancara dengan Muhifuddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, 16 Juni 2026.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa motivasi dari pemerintah cenderung bersifat insidental, bukan program yang dilakukan secara rutin dan terstruktur. Hal ini menyebabkan dampak motivasi terhadap peningkatan usaha tambak belum optimal. Di sisi lain, masyarakat lebih banyak mengandalkan pengalaman dan inisiatif pribadi dalam mengembangkan usaha.

Peran motivator yang dijalankan pemerintah seharusnya mampu membangun kesadaran masyarakat tentang potensi ekonomi usaha tambak udang, sekaligus mendorong mereka untuk lebih produktif dan inovatif. Oleh karena itu, penguatan peran motivator melalui pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan agar usaha tambak udang dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Lam Lumpu Lhok.⁶

4. Peran sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator merupakan fungsi pemerintah dalam mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok usaha dalam rangka menggerakkan pembangunan. Dalam pengembangan usaha tambak udang, peran ini sangat penting karena keberhasilan usaha tidak hanya bergantung pada individu pelaku usaha, tetapi juga pada kerja sama antara pemerintah daerah, kelompok pembudidaya, serta dukungan berbagai pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahri selaku masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, diketahui bahwa kerja sama antara pemerintah

dan kelompok usaha tambak belum terlalu dirasakan secara intensif dalam beberapa tahun terakhir. Informan menyampaikan bahwa masyarakat lebih banyak menjalankan kegiatan usaha secara mandiri tanpa pendampingan kelompok yang aktif.

*"Kami lebih banyak mengelola tambak sendiri, sementara kerja sama dengan pemerintah atau kelompok tidak terlalu aktif dalam beberapa tahun terakhir."*⁶⁰

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh M. Yahya selaku masyarakat, yang menjelaskan bahwa hubungan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha tambak belum berjalan secara berkelanjutan, sehingga koordinasi dalam pengembangan usaha masih terbatas.

*"Kerja sama dengan pemerintah ada, tapi tidak terlalu aktif dan tidak rutin dilakukan."*⁶¹

Sementara itu, Ramli selaku masyarakat menyampaikan bahwa pada periode sebelumnya pemerintah daerah pernah menjalin kerja sama dengan kelompok-kelompok usaha tambak dalam bentuk pembinaan, penyaluran bantuan, serta koordinasi pengembangan usaha.

*"Pemerintah pernah bekerja sama dengan kelompok tambak, terutama dalam pembinaan dan penyaluran bantuan melalui ketua kelompok."*⁶²

Henri Zakariya selaku masyarakat juga menambahkan bahwa keberadaan kelompok usaha tambak sebenarnya membantu dalam

⁶⁰ Wawancara dengan Fahri, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁶¹ Wawancara dengan M. Yahya, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁶² Wawancara dengan Ramli, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

memperkuat koordinasi, namun aktivitas kelompok tersebut tidak selalu berjalan aktif dan konsisten.

*"Kelompok tambak itu ada, tapi tidak selalu aktif. Kalau aktif, biasanya lebih mudah kalau ada bantuan dari pemerintah."*⁶³

Sementara itu, Muhifuddin selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya membangun sinergi dengan kelompok pembudidaya melalui penyuluh perikanan dan program pembinaan. Pemerintah juga mendorong agar kelompok usaha dapat berperan aktif dalam mengelola kegiatan budidaya secara kolektif.

*"Kami mendorong kerja sama dengan kelompok pembudidaya melalui penyuluh perikanan dan pembinaan agar kegiatan usaha bisa lebih terorganisir."*⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa peran pemerintah daerah sebagai dinamisator dalam pengembangan usaha tambak udang di Gampong Lam Lumpu Lhok masih belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat upaya kerja sama melalui kelompok usaha dan penyuluh perikanan, pelaksanaannya belum menunjukkan intensitas yang tinggi dan berkelanjutan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan kelompok usaha tambak belum sepenuhnya berfungsi secara aktif sebagai wadah

⁶³ Wawancara dengan Henri Zakariya, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁶⁴ Wawancara dengan Muhifuddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, 16 Juni 2026.

koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini menyebabkan sinergi dalam pengembangan usaha belum terbangun secara maksimal. Di sisi lain, pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam menggerakkan seluruh aktor secara konsisten di lapangan.

Peran dinamisator seharusnya mampu menciptakan hubungan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mempercepat pengembangan usaha tambak udang. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan kelompok usaha serta peningkatan intensitas koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi hal penting agar pengembangan usaha tambak udang dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Lam Lumpu Lhok.

4.2.2 Program Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Tambak Udang

Program pemerintah daerah merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat, khususnya sektor perikanan budidaya seperti usaha tambak udang. Program tersebut umumnya meliputi pelatihan, bantuan sarana produksi, penyediaan bibit dan pakan, serta peningkatan infrastruktur pendukung usaha. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahri selaku masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, diketahui bahwa masyarakat belum merasakan adanya program pemerintah yang berjalan secara intensif dalam beberapa tahun terakhir. Informan

menyampaikan bahwa kegiatan usaha tambak lebih banyak dilakukan secara mandiri tanpa keterlibatan program bantuan yang berkelanjutan dari pemerintah.

*"Dalam beberapa tahun terakhir kami belum merasakan adanya program bantuan yang berjalan secara langsung dari pemerintah. Usaha tambak kami kelola sendiri."*⁶⁵

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh M. Yahya selaku masyarakat, yang menjelaskan bahwa program pemerintah seperti pelatihan maupun bantuan sarana belum dirasakan secara merata oleh masyarakat pelaku usaha tambak udang.

*"Program pelatihan atau bantuan dari pemerintah belum terlalu kami rasakan secara langsung."*⁶⁶

Sementara itu, Ramli selaku masyarakat menyampaikan bahwa pada periode sebelumnya pemerintah daerah pernah menyalurkan bantuan kepada kelompok usaha tambak, terutama dalam bentuk sarana produksi dan pendampingan kelompok.

*"Pemerintah pernah memberikan bantuan kepada kelompok tambak, biasanya berupa sarana produksi dan dilakukan melalui ketua kelompok."*⁶⁷

Henri Zakariya selaku masyarakat menjelaskan bahwa program pemerintah pernah ada dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan teknis, namun pelaksanaannya tidak dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

⁶⁵ Wawancara dengan Fahri, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁶⁶ Wawancara dengan M. Yahya, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁶⁷ Wawancara dengan Ramli, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

"Pernah ada penyuluhan dari pemerintah, tetapi tidak rutin dilakukan."⁶⁸

Sementara itu, Muhifuddin selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan beberapa program pengembangan tambak udang, seperti pemberian benih, pakan, serta pendampingan melalui penyuluh perikanan. Namun demikian, pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat masih terbatas akibat keterbatasan anggaran.

"Pemerintah daerah memberikan bantuan berupa benih dan pakan serta pendampingan melalui penyuluh, tetapi pelatihan belum maksimal karena keterbatasan anggaran."⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa program pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang di Gampong Lam Lumpu Lhok sudah ada, namun belum berjalan secara optimal dan merata. Program yang dijalankan masih didominasi oleh bantuan sarana produksi dan pendampingan teknis melalui penyuluh perikanan, sementara program pelatihan dan penguatan kapasitas masyarakat masih terbatas.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan program pemerintah dengan realitas di lapangan. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat program, sedangkan pemerintah menyatakan bahwa program telah dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran yang

⁶⁸ Wawancara dengan Henri Zakariya, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁶⁹ Wawancara dengan Muhifuddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, 16 Juni 2026.

tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan jangkauan pelaksanaan di tingkat masyarakat.

Program pemerintah daerah pada dasarnya memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan produktivitas usaha tambak udang, terutama melalui bantuan sarana produksi, bibit, pakan, serta pendampingan teknis. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan peningkatan intensitas pelatihan, pemerataan bantuan, serta penguatan sistem pendampingan agar program dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Lam Lumpu Lhok.

4.2.3 Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Tambak Udang

Dalam pelaksanaan pengembangan usaha tambak udang, pemerintah daerah tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan. Kendala tersebut dapat berasal dari faktor internal pemerintah, kondisi masyarakat, keterbatasan sumber daya, hingga faktor lingkungan dan ekonomi yang memengaruhi keberlanjutan usaha tambak udang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahri selaku masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, diketahui bahwa salah satu kendala yang dirasakan adalah minimnya bantuan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih banyak mengandalkan modal sendiri dalam mengelola usaha tambak udang.

"Selama ini bantuan dari pemerintah sangat minim, jadi kami lebih banyak mengandalkan modal sendiri untuk mengelola tambak."⁷⁰

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh M. Yahya selaku masyarakat, yang menjelaskan bahwa keterbatasan pendampingan dari pemerintah menjadi salah satu kendala dalam pengembangan usaha tambak udang, terutama dalam hal peningkatan kapasitas dan pengetahuan teknis budidaya.

"Pendampingan dari pemerintah masih kurang, jadi kami sering belajar sendiri dalam mengelola tambak."⁷¹

Sementara itu, Ramli selaku masyarakat menyampaikan bahwa salah satu kendala yang dirasakan adalah fluktuasi harga pasar serta biaya produksi yang tidak stabil, sehingga mempengaruhi keuntungan usaha tambak udang.

"Harga udang kadang naik turun, sementara biaya pakan cukup tinggi, jadi keuntungan tidak selalu stabil."⁷²

Henri Zakariya selaku masyarakat juga menjelaskan bahwa faktor lingkungan seperti kualitas air dan kondisi tambak menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan usaha, terutama ketika terjadi perubahan cuaca ekstrem.

"Kadang masalahnya di lingkungan, seperti kualitas air atau cuaca yang tidak stabil sehingga mempengaruhi hasil tambak."⁷³

Sementara itu, Muhifuddin selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar menjelaskan bahwa pemerintah daerah menghadapi beberapa kendala dalam pengembangan usaha tambak udang, antara lain

⁷⁰ Wawancara dengan Fahri, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁷¹ Wawancara dengan M. Yahya, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁷² Wawancara dengan Ramli, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁷³ Wawancara dengan Henri Zakariya, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta masih adanya permasalahan teknis seperti penyakit pada udang dan fluktuasi produksi.

"Kendala yang kami hadapi antara lain keterbatasan anggaran, SDM, serta masalah teknis seperti penyakit udang dan fluktuasi produksi di lapangan."⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kendala dalam pengembangan usaha tambak udang di Gampong Lam Lumpu Lhok bersifat multidimensi, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Kendala tersebut mencakup keterbatasan anggaran pemerintah, kurangnya pendampingan teknis, fluktuasi harga pasar, serta faktor lingkungan yang memengaruhi produktivitas tambak.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya pemerintah daerah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi optimalisasi program pengembangan tambak udang. Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi tantangan dalam hal modal usaha, pengetahuan teknis, serta ketidakstabilan hasil produksi yang berdampak pada pendapatan.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha tambak udang membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi kebijakan pemerintah, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat serta dukungan terhadap faktor eksternal seperti stabilitas harga dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat agar kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir secara bertahap.

⁷⁴ Wawancara dengan Muhifuddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, 16 Juni 2026.

4.2.4 Dampak Pengembangan Usaha Tambak Udang terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pengembangan usaha tambak udang di Gampong Lam Lumpu Lhok memberikan berbagai dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak tersebut terutama terlihat pada peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, serta perubahan kondisi ekonomi keluarga yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahri selaku masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, diketahui bahwa usaha tambak udang memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Meskipun dikelola secara mandiri, usaha tambak tetap menjadi sumber ekonomi utama bagi sebagian masyarakat.

*"Usaha tambak ini cukup membantu dalam meningkatkan pendapatan kami, walaupun dikelola dengan modal sendiri."*⁷⁵

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh M. Yahya selaku masyarakat, yang menjelaskan bahwa usaha tambak udang memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, terutama pada saat proses panen dan perawatan tambak.

*"Tambak udang ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, terutama saat panen dan perawatan tambak."*⁷⁶

Sementara itu, Ramli selaku masyarakat menyampaikan bahwa usaha tambak udang telah membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, meskipun hasilnya masih tergantung pada kondisi produksi dan harga pasar.

⁷⁵ Wawancara dengan Fahri, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁷⁶ Wawancara dengan M. Yahya, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

*"Alhamdulillah, usaha tambak ini membantu memperbaiki ekonomi keluarga, meskipun hasilnya tidak selalu stabil."*⁷⁷

Henri Zakariya selaku masyarakat juga menjelaskan bahwa usaha tambak udang memberikan dampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

*"Usaha tambak ini cukup berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama untuk kebutuhan sehari-hari."*⁷⁸

Sementara itu, Muhifuddin selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar menjelaskan bahwa usaha tambak udang memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada wilayah yang masih aktif melakukan budidaya secara intensif. Menurut beliau, sistem budidaya yang baik dapat meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat.

*"Usaha tambak udang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terutama pada wilayah yang budidayanya masih berjalan dengan baik dan intensif."*⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pengembangan usaha tambak udang di Gampong Lam Lumpu Lhok memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut terlihat dari peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan pekerjaan, serta perbaikan kondisi ekonomi keluarga.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa usaha tambak udang menjadi salah satu sektor ekonomi yang cukup penting bagi masyarakat setempat, meskipun

⁷⁷Wawancara dengan Ramli, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

⁷⁸ Wawancara dengan Henri Zakariya, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni

masih terdapat tantangan dalam hal stabilitas pendapatan akibat fluktuasi produksi dan harga pasar. Namun demikian, secara umum usaha ini tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dampak kesejahteraan yang dihasilkan dari usaha tambak udang menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih optimal dari pemerintah daerah agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat lebih merata dan berkelanjutan di Gampong Lam Lumpu Lhok.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Tambak Udang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang di Gampong Lam Lumpu Lhok belum berjalan secara optimal, baik sebagai regulator, fasilitator, motivator, maupun dinamisor.⁷⁹ Masyarakat masih merasakan bahwa keterlibatan pemerintah dalam bentuk bantuan, pendampingan, dan pengawasan belum dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang pengembangan usaha perikanan budidaya di Aceh Besar yang menyatakan bahwa peran pemerintah daerah masih bersifat parsial dan belum menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat pembudidaya, terutama dalam aspek pendampingan teknis dan fasilitasi modal usaha.

⁷⁹ Sari, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Perikanan Budidaya di Aceh Besar," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan*, 2022.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang menemukan bahwa pada beberapa daerah pesisir, pemerintah daerah telah menjalankan peran regulator dan fasilitator secara cukup efektif melalui program pembinaan kelompok nelayan dan bantuan sarana produksi yang berkelanjutan.⁸⁰

Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas peran pemerintah sangat bergantung pada kapasitas anggaran daerah, kelembagaan, serta intensitas program di lapangan. Dalam konteks Gampong Lam Lumpu Lhok, keterbatasan intervensi pemerintah menyebabkan masyarakat lebih banyak mengandalkan inisiatif sendiri dalam mengembangkan usaha tambak udang.

4.3.2 Analisis Program Pemerintah dalam Pengembangan Tambak Udang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemerintah seperti bantuan benih, pakan, dan pendampingan melalui penyuluh sudah ada, namun belum berjalan optimal dan tidak merata. Program pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat juga masih terbatas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian menyatakan bahwa program bantuan perikanan sering kali lebih menekankan pada bantuan fisik dibandingkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga dampaknya terhadap kemandirian masyarakat menjadi kurang maksimal.⁸¹

⁸⁰ Hidayat, "Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Nelayan Pesisir," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2021.

⁸¹ Nurlaila, "Evaluasi Program Bantuan Perikanan di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Publik*, 2020.
Putra, "Dampak Pelatihan terhadap Produktivitas Tambak Udang," *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 2023.

Sebaliknya, salah penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas tambak udang hingga lebih dari 30% dalam jangka waktu tertentu.⁸²

Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bantuan, tetapi juga oleh keberlanjutan, kualitas pendampingan, serta kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

4.3.3 Analisis Kendala Pengembangan Tambak Udang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pengembangan usaha tambak udang meliputi keterbatasan anggaran pemerintah, kurangnya pendampingan teknis, keterbatasan modal masyarakat, fluktuasi harga pasar, serta faktor lingkungan seperti penyakit udang dan kualitas air.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lubis (2021) yang menjelaskan bahwa sektor perikanan budidaya sangat rentan terhadap risiko lingkungan dan pasar, sehingga diperlukan dukungan pemerintah dalam bentuk stabilisasi harga dan penguatan kelembagaan petani tambak.⁸³

Selain itu, penelitian Rahman (2022) juga menemukan bahwa keterbatasan modal dan akses pembiayaan menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha

⁸² Lubis, "Risiko Usaha Perikanan Budidaya di Wilayah Pesisir," *Jurnal Ekonomi Maritim*, 2021.
Rahman, "Akses Modal dalam Pengembangan Usaha Tambak," *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 2022.

⁸³ Sutrisno, "Kontribusi Perikanan Budidaya terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2020.

tambak di wilayah pesisir, yang menyebabkan banyak pelaku usaha tidak mampu meningkatkan skala produksinya.⁸⁴

Dengan demikian, kendala yang ditemukan dalam penelitian ini bersifat multidimensi dan tidak hanya berasal dari satu faktor, melainkan kombinasi antara faktor internal masyarakat dan eksternal pemerintah.

4.3.4 Analisis Dampak Pengembangan Tambak Udang terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha tambak udang memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan perbaikan ekonomi keluarga.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa usaha perikanan budidaya memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya dalam aspek pendapatan dan kesempatan kerja.⁸⁵

Namun, salah satu penelitian menunjukkan bahwa meskipun usaha tambak memberikan dampak ekonomi positif, tingkat kesejahteraan masyarakat tetap dipengaruhi oleh stabilitas produksi dan harga pasar yang cenderung fluktuatif.⁸⁶

⁸⁴ Rahman, "Akses Modal dalam Pengembangan Usaha Tambak," *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 2022.

⁸⁵ Sutrisno, "Kontribusi Perikanan Budidaya terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2020.

⁸⁶ Amalia, "Fluktuasi Harga dan Kesejahteraan Nelayan Tambak," *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 2021.

Hal ini juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana masyarakat mengalami peningkatan pendapatan, tetapi masih menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat fluktuasi hasil produksi dan harga jual udang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Tambak Udang untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Lam Lumpu Lhok Kecamatan Peukan Bada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Lam Lumpu Lhok, Kecamatan Peukan Bada, belum berjalan secara optimal. Pemerintah telah menjalankan perannya melalui penyusunan kebijakan, penyediaan bantuan sarana dan prasarana, penyediaan benur berkualitas, pendampingan teknis, penyuluhan, serta upaya meningkatkan akses terhadap permodalan dan pemasaran hasil tambak. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum dilakukan secara berkelanjutan dan belum menjangkau seluruh pembudidaya tambak. Meskipun demikian, pengembangan usaha tambak udang tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui peningkatan pendapatan, terbukanya kesempatan kerja, serta perbaikan kondisi ekonomi keluarga, walaupun manfaat tersebut belum dirasakan secara merata dan masih dipengaruhi oleh kondisi produksi maupun harga pasar.
2. Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah daerah dalam

pengembangan usaha tambak udang terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor pendukung meliputi potensi sumber daya alam yang mendukung budidaya tambak udang, tingginya minat masyarakat dalam mengembangkan usaha tambak, adanya penyuluh perikanan, serta dukungan pemerintah melalui bantuan benur, pakan, dan pendampingan teknis. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran pemerintah, belum optimalnya pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, keterbatasan modal usaha, fluktuasi harga udang di pasaran, serta gangguan lingkungan seperti serangan penyakit yang memengaruhi produktivitas tambak. Berbagai faktor tersebut menyebabkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha tambak udang belum dapat terlaksana secara maksimal.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi perannya dalam pengembangan usaha tambak udang, terutama dalam memperkuat program pendampingan, memperluas jangkauan bantuan, serta meningkatkan pelatihan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan kelompok usaha tambak agar program yang dijalankan lebih efektif dan tepat sasaran.
2. Bagi Masyarakat/Pelaku Usaha Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengikuti program pemerintah seperti penyuluhan dan pelatihan, serta

memperkuat kerja sama dalam kelompok usaha tambak agar pengelolaan usaha menjadi lebih profesional, produktif, dan berkelanjutan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengembangan usaha tambak udang dengan menambahkan variabel lain seperti teknologi budidaya, pemasaran hasil produksi, serta analisis ekonomi yang lebih mendalam.



DAFTARPUSTAKA

- Adisasmita, R. (2008). Pengembangan wilayah: Konsep dan teori. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andini, R. D., Sugianto, S., & Tambunan, K. (2024). Analisis kesejahteraan petani tambak udang vaname Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dalam perspektif ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 2(2), 135–148.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Dahuri, R. (2003). Keanekaragaman hayati laut: Aset pembangunan berkelanjutan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service: Serving, not steering*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Fauzi, A. (2010). *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fauziyah, E., Faiha, I., & Triyasari, S. R. (2024). Manajemen risiko rantai pasok pada tambak udang vaname. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 8(4), 1238–1255.
- Henry, N. (2013). *Public administration and public affairs* (12th ed.). New York: Routledge.
- Hidayat, “Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Nelayan Pesisir,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2021.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2002). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Men/2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Perikanan. Jakarta: KKP RI.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2004). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Men/2004 tentang Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan. Jakarta: KKP RI.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2004). Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Jakarta: KKP.
- Kusumastanto, T. (2002). Reformasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB.

- Lamia, K. A. (2013). Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*, 5(2), 1749–1758.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nurlaila, “Evaluasi Program Bantuan Perikanan di Indonesia,” *Jurnal Kebijakan Publik*, 2020.
- Putra, “Dampak Pelatihan terhadap Produktivitas Tambak Udang,” *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 2023.
- Rahman, A., & Putri, D. A. (2023). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan sektor perikanan berbasis ekonomi lokal. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 15(2), 145–158.
- Rasyid, R. (2000). *Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2018), hlm. 35.
- Sari, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Perikanan Budidaya di Aceh Besar,” *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan*, 2022.
- Sari, M., & Hidayat, T. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal di wilayah pesisir. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 11(1), 67–80.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. New York: Oxford University Press.
- Sirojuzilam. (2009). *Disparitas ekonomi dan perencanaan regional*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Waldo, D. (1948). *The administrative state: A study of the political theory of American public administration*. New York: Ronald Press.
- Wawancara dengan Fahri, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.
- Wawancara dengan M. Yahya, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.
- Wawancara dengan Ramli, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.
- Wawancara dengan Henri Zakariya, masyarakat Gampong Lam Lumpu Lhok, 15 Juni 2026.

Wawancara dengan Muhifuddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, 16 Juni 2026.

Zaki, M. A., Ananda, D., Suara, M. J., Sari, E., Meirani, V., Amelia, S., & Setyanto, A. R. (2024). Dinamika peran usaha tambak udang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Pagar Jaya Kabupaten Pesawaran. *Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan*, 1(4), 101–108.

Lubis, “Risiko Usaha Perikanan Budidaya di Wilayah Pesisir,” *Jurnal Ekonomi Maritim*, 2021.

Rahman, “Akses Modal dalam Pengembangan Usaha Tambak,” *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 2022.

Sutrisno, “Kontribusi Perikanan Budidaya terhadap Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2020.

Amalia, “Fluktuasi Harga dan Kesejahteraan Nelayan Tambak,” *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 2021.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3163/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelégasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 06 Maret 2024
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara:
- Zakki Foad Khalil, M.Si.**
- Untuk membimbing skripsi:
- Nama : **Muhammad Zulham**
- NIM : 190802089
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : **Dampak Pengembangan Usaha Tambak Udang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Peukan Bada Desa Lam Lumpu Lhok**
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Tertanda:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Presidium yang bersangkutan untuk disosialisir dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA TAMBAK UDANG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI GAMPONG LAM LUMPU LHOK KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH BESAR

Identitas Informan

1. Kode Informan :
2. Nama Informan :
3. Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Aceh Besar
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Tanggal Wawancara :
7. Waktu Wawancara :
8. Tempat Wawancara :

a. Dimensi Kebijakan dan Pengawasan Usaha Tambak

1. Bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Besar dalam mendukung pengembangan usaha tambak udang di Gampong Lam Lumpu Lhok?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dinas terhadap kegiatan usaha tambak udang agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

b. Dimensi Bantuan Sarana dan Pelatihan

3. Program bantuan sarana dan prasarana apa saja yang telah diberikan kepada pelaku usaha tambak udang di Gampong Lam Lumpu Lhok?
4. Bagaimana bentuk pelatihan atau peningkatan kapasitas yang diberikan kepada pelaku usaha tambak udang untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka?

c. Dimensi Pembinaan dan Dorongan Usaha

5. Bagaimana upaya pembinaan yang dilakukan dinas dalam membantu pelaku usaha tambak mengatasi berbagai permasalahan usaha yang dihadapi?
6. Strategi apa yang dilakukan dinas untuk mendorong masyarakat agar tertarik mengembangkan usaha tambak udang sebagai sumber mata pencaharian?

d. Dimensi Kerja Sama dan Pengembangan Jaringan

7. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan dinas dengan pemerintah gampong, instansi lain, lembaga keuangan, maupun pihak swasta dalam mendukung pengembangan usaha tambak udang?

e. Dimensi Produksi, Modal, Teknologi, dan Pemasaran

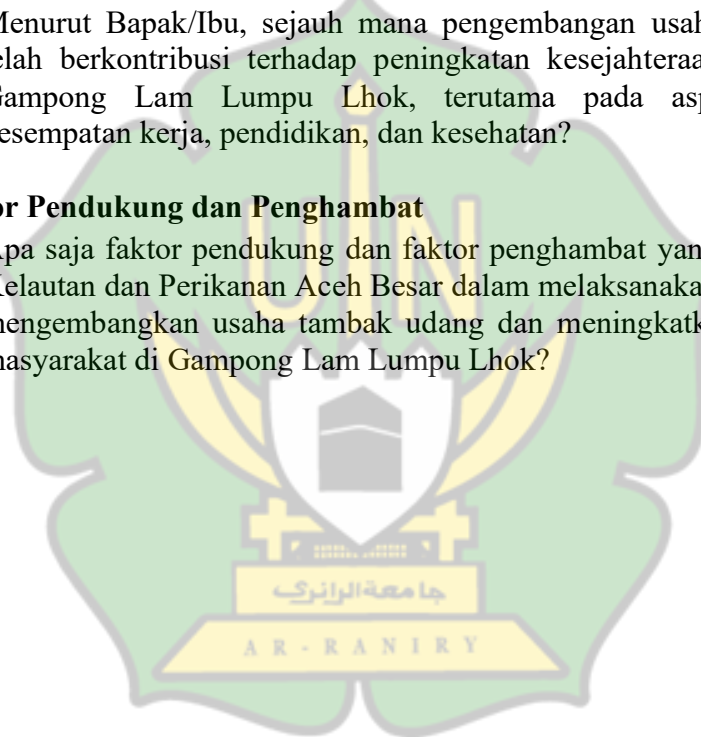
8. Bagaimana peran dinas dalam membantu pelaku usaha tambak terkait peningkatan produksi, akses permodalan, penggunaan teknologi budidaya, dan pemasaran hasil tambak?

f. Dimensi Kesejahteraan Masyarakat

9. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana pengembangan usaha tambak udang telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Gampong Lam Lumpu Lhok, terutama pada aspek pendapatan, kesempatan kerja, pendidikan, dan kesehatan?

g. Faktor Pendukung dan Penghambat

10. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Besar dalam melaksanakan perannya untuk mengembangkan usaha tambak udang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Lam Lumpu Lhok?



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GEUCHIK, PENGUSAHA TAMBAK, DAN MASYARAKAT

Penelitian

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA TAMBAK UDANG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI GAMPONG LAM LUMPU LHOK KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR

A. IDENTITAS INFORMAN

1. Kode Informan :
2. Nama Informan :
3. Jenis Kelamin :
 - Laki-laki
 - Perempuan
4. Umur : Tahun
5. Pendidikan Terakhir :
6. Pekerjaan/Jabatan :
7. Alamat :
8. Tanggal Wawancara :
9. Tempat Wawancara :
10. Waktu Wawancara :

B. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

a. Dimensi Kebijakan dan Pengawasan Usaha Tambak

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan usaha tambak udang di Gampong Lam Lumpu Lhok?
2. Apakah pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha tambak udang? Jika ya, bagaimana bentuk pengawasan tersebut?

b. Dimensi Bantuan Sarana dan Pelatihan

3. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima atau mengetahui adanya bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah untuk mendukung usaha tambak udang? Jelaskan.
4. Apakah pemerintah daerah pernah memberikan pelatihan atau penyuluhan terkait pengelolaan usaha tambak udang? Bagaimana manfaatnya bagi masyarakat atau pelaku usaha?

c. Dimensi Pembinaan dan Dorongan Usaha

5. Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan pemerintah daerah kepada pelaku usaha tambak udang di Gampong Lam Lumpu Lhok?

6. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah daerah telah memberikan motivasi atau dorongan yang cukup kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha tambak udang? Jelaskan.

d. Dimensi Kerja Sama dan Pengembangan Jaringan

7. Apakah pemerintah daerah pernah menjalin kerja sama dengan pihak lain (perusahaan, lembaga, kelompok usaha, atau instansi terkait) untuk mendukung pengembangan usaha tambak udang? Bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat atau pelaku usaha?

e. Dimensi Produksi, Modal, Teknologi, dan Pemasaran

8. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam membantu pelaku usaha tambak udang terkait permodalan, peningkatan produksi, penggunaan teknologi, dan pemasaran hasil tambak?

f. Dimensi Kesejahteraan Masyarakat

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengembangan usaha tambak udang telah memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat? Jelaskan pengaruhnya terhadap pendapatan, kesempatan kerja, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

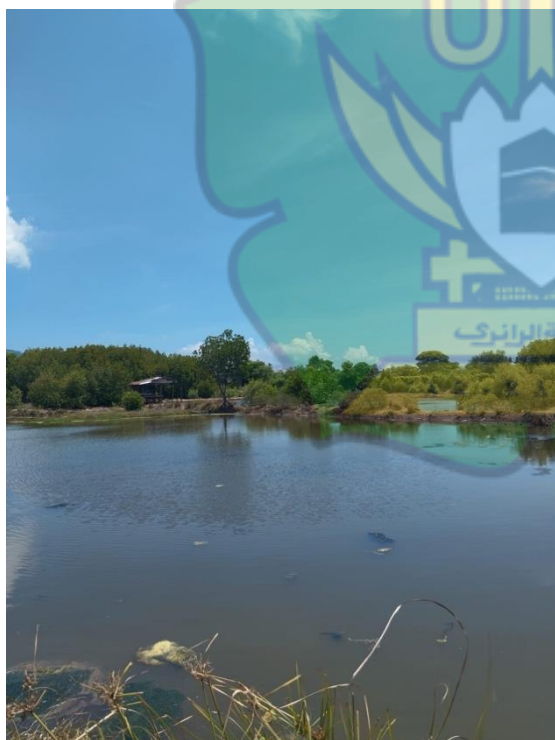
g. Faktor Pendukung dan Penghambat

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha tambak udang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Lam Lumpu Lhok?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Besar, 08 April 2001
 Nomor Handphone : 087838013755
 Alamat : Desa Baroh Geunteut, Kecamatan Lhoong,
 Kabupaten Aceh Besar
 Email : 190802089@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Geunteut
 Sekolah Menengah Pertama : SMPN 01 Lhoong
 Sekolah Menengah Atas : SMAN 01 Peukan Bada
Sertifikat
 Ma'had Al Jamiah : C/Ma'had Al-Jami'ah
 TOEFL : 400/2026/Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Komputer : B/2026/Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Magang : A-/2022/Kantor Wali Kota Banda Aceh

Banda Aceh, 30 Agustus 2026

Muhammad Zulham
 NIM. 190802089